

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan. (2020). (n.p.): Airlangga University Press.
- Dr. Edy Ikhsan, *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum.*(Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2021)
- Fidel, 2014, *Advokat: Penegak Hukum yang Mandiri*, Carofin Media, Jakarta.
- Gultom, Binsar, 2015, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- I Made Suwitra, 2018, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali*, Logoz Publishing, Bandung.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : Alfabeta.
- Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013).
- Limbong, B. (2012). *Hukum agraria nasional*. Indonesia: Pustaka Margaretha.
- Marzuki, Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Murad, R. (2013). *Administrasi pertanahan: pelaksanaan hukum pertanahan dalam praktek*. Indonesia: CV Mandar Maju.

Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah. N.p., Bhuana ilmu populer, 2019.

Rosnidar, *Hukum Pertanahan Adat* (Depok : Rajawali Pers, 2017).

Syarief, E. 2014. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Syarief, E. (2012). Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan. Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).

Soesangobeng, H. (2012). *Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria*. Indonesia: STPN Press.

Syarief, E. (2014). *Persertifikatan tanah bekas hak eigendom*. Indonesia: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Sutedi, Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

Taufani, G. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktis / Suteki*.

Waskito, dkk., *Pertanahan Agraria, dan Tata Ruang* (Jakarta : Kencana, 2017).

SKRIPSI

Brigitta Adventa. 2009. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kampung Colo Kelurahan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Surakarta*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Hananto, Y. W. J. N. 2012. *Pengertian Hakim Dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Kekuasaan Kehakiman Oleh Komisi Yudisial (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Indriati, Y. 2013. *Pipil Sebagai Alas Kepemilikan Atas Tanah Hak Milik Adat Di Bali: Analisis Kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 700 PK/PDT/2011= Pipil As An Indigenous Land's Right In Bali: Case Analysis Of Judicial Review Supreme Court Verdict Number: 700 PK/PDT/2011*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

JURNAL / ARTIKEL

Abon, M. A., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. 2022. *Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.

Dewanto, P. 2020. *Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan*. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.

Jeklin, A. 2016. *Tinjauan Umum tentang Hak Atas Tanah di Indonesia*. *July*, 1(21), 1–23.

Juniari, N. K. P., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. 2023. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Adat Di Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 7(1), 35-44.

- Mahfiana, L. 2013. *Sengketa kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Ponorogo. Kodifikasia*, 7(1), 1-20.
- Marsella, M. 2015. *Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101-107.
- Nasution, S. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Jurnal doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Pangidoan, D., Franciska, W., & Hutomo, P. 2022. *Analisis Yuridis Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 105-119.
- Purwanto, Komang Ayu T., Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. 2019. *"Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." Jurnal Komunitas Yustisia* 2(2), 113-123.
- Sitompul, M. S. 2016. *Harmonisasi Pengaturan Tentang Kewenangan Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Spb) Kapal Ikan Di Pelabuhan Belawan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Jurnal Mercatoria*, 9(2), 136-153
- Setiadi, W., Sinjar, M. A., & Sugiyono, H. (2019). Implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli

tanah menurut hukum adat di tanjungsari, kabupaten bogor. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1).

TARIGAN, R. F. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penguasaan Tanpa Hak/Memakai Tanah Tanpa Ijin (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 02/PID. C/2016/PN-KBJ) (Jurnal Doctoral dissertation, Universitas Quality)*.

Uktolseja, N., & Radjawane, P. 2019. *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*. *Sasi*, 25(1), 13-26.

Wowor, F. 2014. *Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah*. *Lex Privatum*, 2(2),55-65.

Wardani, W. I. 2018. *Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria Nasional*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 15(2).1-12.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 Tentang. Perubahan Vorstenlands Grondhuurreglement

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)